

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The Effect of The Variables of Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance: The Case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(8), 1915–1926.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat (km), 2022. Diakses 29 Juni 2025 dari <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/U0VOeFZEZFNiVnByUkdGMINrOTFVVGRHY1ZkVGR6MDkjMw==/panjang-jalan-menurut-kabupaten-kota-dan-tingkat-kewenangan-pemerintahan-di-provinsi-jawa-barat--km---2024.html?year=2022>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat (km), 2023. Diakses 29 Juni 2025 dari <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/U0VOeFZEZFNiVnByUkdGMINrOTFVVGRHY1ZkVGR6MDkjMw==/panjang-jalan-menurut-kabupaten-kota-dan-tingkat-kewenangan-pemerintahan-di-provinsi-jawa-barat--km---2024.html?year=2023>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat (km), 2024. Diakses 29 Juni 2025 dari <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/U0VOeFZEZFNiVnByUkdGMINrOTFVVGRHY1ZkVGR6MDkjMw==/panjang-jalan-menurut-kabupaten-kota-dan-tingkat-kewenangan-pemerintahan-di-provinsi-jawa-barat--km---2024.html?year=2024>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024. Diakses 17 Juli 2025 dari <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/35ffe2d35104b39feb577e8f/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025. Diakses 29 Juni 2025 dari <https://jabar.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/d906b36c4b300ab77908dfe2/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2025.html>
- BAPENDA JABAR. (2023). Inovasi Transaksi Berbasis Elektronik Antar Bapenda Jabar Raih detikJabar Awards 2023. Diakses 17 Juli 2025 dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/2023/06/20/inovasi-transaksi-berbasis-elektronik-antar-bapenda-jabar-raih-detikjabar-awards-2023/>

- BAPENDA JABAR. (n.d). Pajak Kendaraan Bermotor. Diakses 3 Juni 2025 dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>
- Budi, A., Indonesia, W., Pellegrini, L., & Sparrow, R. (2017). The Impact of Basic Infrastructure on Tax Effort: A Case Study of Municipalities/Regencies in Indonesia.
- Dalimunthe, R. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Darmayani, S. A. P. S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2813–2821.
- Dwiyanto, A. (2017). Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Idris, Muhammad. (2024). 4 Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pengelompokannya sesuai UU. Diakses 30 Mei 2025 dari <https://money.kompas.com/read/2024/09/08/221028826/4-sumber-pendapatan-asli-daerah-dan-pengelompokannya-sesuai-uu>
- Ilma'nun, L. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ismawati, & Fitriyanti. (2023). Pengaruh Volume Kendaraan terhadap Tingkat Kerusakan Jalan pada Perkerasan Rigid di Desa Labokong Kabupaten Soppeng. *Jurnal Teknik Sipil Universitas Lamappapoleonro (JTEKSIL)*, 1(2), 72–80. <https://doi.org/10.57093/jteksil.v1i2>
- Kurniawati, R. A., Salsabila, T. I., Hawa, P. N., & Deffinika, I. (2022). Pengaruh Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan terhadap Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Transportasi*, 22(2), 155–162.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Audited).
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993>
- Nichelatti, E., & Hiilamo, H. (2024). The Effect of Citizens' Perception of Governance on Tax Compliance: A Cross-Country Analysis Study for 32 Sub-Saharan African Countries. *European Journal of Development Research*, 36(5), 1198–1226. <https://doi.org/10.1057/s41287-024-00631-2>
- Nugroho, M. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Publik, dan Perkembangan Infrastruktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Nurahmani, A. (2022). Peranan Hukum dalam Pembangunan: Studi Ketimpangan Pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. *Padjajaran Law Review*, 10(2), 1–20. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.840>

- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22–39.
- Safitri, J. N. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Etika Perpajakan, dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Universitas Gadjah Mada.
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2019). SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Salemba Empat.
- Schindler, P. S. (2019). *Business Research Methods* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Sitanggang, G. D., & Budyastuti, T. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Sanksi Perpajakan dan Implementasi Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Jakarta Selatan). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA*, 8(4), 1394–1403.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sumartik. (2018). *Perilaku Organisasi*. UMSIDA Press.
- Utami, M. R. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah di Kota Batam. Universitas Brawijaya.
- Widiastuti, S. A., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Purwantoro. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Demak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 289–300. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1929>

- Yudistira, A. R., Yasmin, H. A., & Pasya, M. K. (2025). Upaya Mengatasi Kemacetan di Jawa Barat melalui Pengelompokan Kendaraan Pribadi. Gunung Djati Conference Series, 50.
- Yusuf., M. A. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. KENCANA.